

EVALUASI PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM AKUNTANSI PENGIKATAN POLIS, PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN STUDI PADA AJB BUMIPUTERA 1912 MALANG CABANG DIENG

Resti Mela
Siti Ragil Handayani
Achmad Husaini
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
email: restimela@yahoo.com

Abstract

The Evaluation of Internal Control on Accounting System Policy Until Submission And Payment Claim of Health Insurance (Studies on AJB Bumiputera 1912 Dieng Branch Malang). The establishment of internal control system is to avoid various types of irregularities and errors that may occur. This study has several objectives, namely to determine the system of internal control in Binding Accounting Policy, payment submission of health insurance claims and disbursements payment of health insurance claims. This type of study is a descriptive, with a study focus on the binding policy accounting system, the accounting system of submission claims payments, system accounting of cash expenditures and the internal control of cash expenditure for payment of claims. The study was conducted in AJB Bumiputera 1912 Branch Malang Dieng. The analysis in this study is to analyze of internal control in binding accounting policy system, payment submission of health insurance claims and disbursements payment of health insurance claims consisting of the organizational structure, authorization, good practice. The accounting system that consists of related functions, forms and the accounting records. From the study, almost all the forms that are used are not numbered prints that still can not be held responsible for its use. to storage premium payments to agents necessary to form proof of receipt. As well as the description of the explanation is given at the time of payment of claims.

Keyword : Internal Control, accounting system, insurance, expenditure cash

Abstrak

Evaluasi pengendalian intern terhadap sistem akuntansi pengikatan polis, pengajuan dan pembayaran klaim asuransi kesehatan (studi pada AJB Bumiputera 1912 malang cabang dieng). Diadakannya sistem pengendalian intern agar berbagai jenis penyimpangan dan kesalahan yang mungkin terjadi bisa dihindari. Penelitian ini memiliki untuk mengetahui pengendalian intern dalam sistem akuntansi pengikatan polis, pengajuan pembayaran klaim asuransi kesehatan dan pengeluaran kas untuk pembayaran klaim asuransi kesehatan pada AJB Bumiputera 1912 Malang Cabang Dieng. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan fokus penelitian pada sistem akuntansi pengikatan polis, sistem akuntansi pengajuan pembayaran klaim, sistem akuntansi pengeluaran kas, dan pengendalian intern terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas untuk pembayaran klaim. Penelitian dilakukan di AJB Bumiputera 1912 Malang Cabang Dieng. Analisis dalam penelitian ini adalah melakukan analisis pengendalian intern dalam sistem akuntansi pengikatan polis, pengajuan dan pengeluaran kas untuk pembayaran klaim asuransi kesehatan pada AJB Bumiputera 1912 malang cabang dieng yang terdiri dari struktur organisasi, otorisasi/wewenang yang jelas, praktek yang sehat. Sistem akuntansi yang terdiri dari fungsi – fungsi yang terkait, formulir yang digunakan dan catatan akuntansi yang digunakan. Dari hasil penelitian, hampir semua formulir yang digunakan tidak bernomor urut tercetak sehingga masih belum dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaannya. Sebaiknya pada AJB Bumiputera 1912 malang cabang dieng untuk penitipan pembayaran premi kepada agen perlu adanya formulir tanda terima bukti, serta diberikan keterangan penjelasan pengajuan pembayaran klaim pada saat pengikatan polis oleh agen.

1.PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang begitu pesat telah merubah cara berpikir bangsa Indonesia, dari cara pikir tradisional ke modern yang penuh dengan ketidakpastian yang selalu diiringi oleh resiko. Salah satu akibat dari perkembangan zaman tersebut adalah perkembangan teknologi, semua jalan di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan lain sebagainya padat merayap dengan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Kemungkinan kecelakaan yang memakan jiwa manusia semakin besar, kecelakaan di jalan raya, pekerja pembangunan dan pabrik-pabrik seringkali terjadi. Untuk melindungi jiwa seseorang dari malapetaka yang mungkin terjadi, yang belum diketahui sebelumnya serta sekedar mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan. Terlebih kesehatan seseorang yang tidak terduga, seperti sakit atau pun kematian pada semua manusia, memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan Sang Pencipta menjadi bagian dari kehidupan manusia. Melindungi jiwa seseorang atas kemungkinan kecelakaan yang memakan jiwa serta kesehatan yang tidak bisa diprediksikan, ada beberapa metode yang digunakan untuk menangani resiko tersebut yaitu penanganan resiko (*risk control*) dan pembiayaan resiko (*risk financing*). Metode *risk control* yaitu dengan cara menghindari resiko, mengendalikan resiko, memisahkan resiko, melakukan kombinasi resiko, dan memindahkan resiko. Cara atau metode yang digunakan dalam *risk financing* yaitu memindahkan resiko melalui asuransi atau melakukan retensi. Berkembangnya zaman membuat masyarakat sadar akan pentingnya asuransi, untuk memproteksi diri dan mengantisipasi peristiwa tidak terduga yang terjadi pada seseorang, maka di Indonesia banyak bermunculan perusahaan asuransi yang menawarkan asuransi kesehatan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah salah satu dari sekian banyak lembaga asuransi yang berkembang di Indonesia. Uang pertanggungan atau biasa disebut klaim pada asuransi kesehatan dibayar bilamana terjadi klaim habis kontrak dan klaim meninggal dunia yang terjadi pada tertanggung. Untuk klaim meninggal terjadi perlakuan khusus. Uang klaim akan dibayar oleh perusahaan asuransi ketika terjadi kematian yang dialami oleh tertanggung. Sebelum pembayaran

klaim meninggal dilakukan, pihak perusahaan wajib melakukan penelitian terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk meneliti dan membuktikan kebenaran data kematian tertanggung. Pihak perusahaan juga wajib melakukan penelitian untuk pengikatan polis pada calon tertanggung yang berusia tua, bisa saja calon tertanggung memang sudah divonis team medis meninggal dalam jangka waktu satu atau dua tahun lagi, sehingga pihak keluarga mendaftarkan calon tertanggung untuk asuransi kesehatan. Semakin tua usia seseorang mengikuti asuransi, semakin besar resiko yang dihadapi perusahaan. Pembayaran klaim berhubungan dengan pengeluaran kas. Kas merupakan unsur vital bagi perusahaan, karena kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid dan paling mudah untuk disalahgunakan. Untuk melindungi kas dan menjamin keandalan catatan akuntansi kas, maka pada proses pengajuan pembayaran klaim diperlukan adanya pengendalian intern yang baik dan efektif. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui sistem akuntansi pengikatan polis asuransi kesehatan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Malang Dieng (2) Untuk mengetahui sistem akuntansi pengajuan pembayaran klaim asuransi kesehatan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Malang Dieng (3) Untuk mengetahui sistem akuntansi pengeluaran kas untuk pembayaran klaim asuransi kesehatan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Malang Dieng (4) Untuk mengetahui pengendalian intern terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas untuk pembayaran klaim kesehatan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Malang Dieng.

2.KAJIAN PUSTAKA

1. Sistem akuntansi

Sistem akuntansi diperlukan oleh perusahaan untuk mengetahui, menganalisa dan juga mengolahnya menjadi suatu informasi yang bersifat keuangan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan oleh manager dan juga untuk menilai keefektifitasan dan efisiensi dari operasional perusahaan. Sistem akuntansi sebagai suatu organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. (Mulyadi, 2001:3). Sistem akuntansi adalah formulir-

formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kegiatan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi. (Baridwan, 2002:4). Sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, menggolongkan, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi perusahaan dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan kewajiban yang terkait. (Krismiaji, 2002:219). Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi, sebagai berikut (a) Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru (b) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada (c) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern (d) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. (Mulyadi, 2001:19-21). Proyek pengembangan sistem pada umumnya mencakup tiga tahap utama yaitu analisis sistem, perancangan sistem, dan implementasi sistem. Analisis sistem meliputi formulasi dan evaluasi solusi-solusi atas masalah-masalah sistem, perancangan sistem adalah proses menspesifikasikan rincian solusi yang dipilih oleh proses analisis sistem, sedangkan implementasi sistem adalah proses penempatan rancangan prosedur-prosedur dan metode-metode baru, atau yang telah direvisi, ke dalam operasi. (Bodnar, George dan Hoopwood, 2003: 26). Pengembangan sistem adalah suatu jenis pemecahan masalah yang terstruktur dengan aktivitas yang jelas. Aktivitas-aktivitas ini terdiri dari analisis sistem, perancangan sistem, pemrograman, pengujian, konversi, serta produksi dan pemeliharaan. (Laudon, 2008:208). Sistem akuntansi memiliki beberapa unsur. Beberapa unsur pokok sistem akuntansi adalah (a) Formulir (b) Jurnal (c) Buku Besar (d) Buku Pembantu (e) Laporan (Mulyadi, 2001:3-4). Unsur-unsur dari sistem akuntansi utama dalam pendapat lain terdiri dari empat unsur yaitu (a) Klasifikasi rekening (b) Buku besar dan buku pembantu (c) Jurnal (d) Bukti transaksi (Baridwan, 2002: 6).

2. Sistem pengendalian intern

Pengendalian intern dapat mempunyai arti sempit dan luas. Dalam arti yang sempit, pengendalian intern merupakan pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar (*crossfooting*) maupun penjumlahan menurun (*footing*). Dalam arti yang luas, pengendalian intern tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan. (Baridwan, 2002:13). Pengertian secara sempit pengendalian intern (*internal control*) merupakan *internal check*, yaitu melakukan pengujian atas kebenaran perkalian, penjumlahan dan pengurangan angka-angka yang tertera dalam formulir, serta penelitian cara penjurnalan (pencatatan). Dalam pengertian luas, pengendalian intern tidak sekedar menguji kebenaran angka - angka dan pencatatan, tetapi mencakup mekanisme dari seluruh perangkat yang digunakan manajemen untuk melaksanakan fungsi pengawasan (Marom, 2002:2). Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai, begitu juga dengan pengendalian intern yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua macam: pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*). Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek keandalan data akuntansi. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. (Mulyadi, 2001:163). Tujuan dari pengendalian intern yang dilaksanakan setiap organisasi, sebagai berikut (a) Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi (b) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi (c) Menunjukkan efisiensi dalam operasional perusahaan (d) Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. (Baridwan, 2002:13). Tujuan dari sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut (a) Menjaga kekayaan (b) Mengecek ketelitian (c) Mendorong efisiensi (d) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. (Bastian dan Soepriyanto, 2003:103).

Dalam pengendalian intern terdapat unsur-unsur yang dapat menjadikan pengendalian berjalan secara efektif dan efisien. Unsur pokok pengendalian intern adalah (a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas (b) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya (c) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi (d) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. (Mulyadi, 2001:164). Ada teori lain tentang unsur-unsur pengendalian intern, yaitu (a) Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tepat (b) Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapat-pendapat, dan juga biaya-biaya (c) Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan didalam melakukan tugas-tugas dan fungsi setiap bagian dalam organisasi (d) Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggungjawabnya. (Baridwan, 2002:14).

3. Sistem akuntansi pengeluaran kas

Dalam melaksanakan aktivitas, perusahaan pasti mengeluarkan uang, baik secara materiil ataupun tidak. Dalam mengeluarkan uang harus ada sistem yang baik agar tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam aktivitasnya. “dalam melaksanakan pengeluaran kas ada dua cara, sistem pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil” (Mulyadi, 2001:509). Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah (a) Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas (b) Fungsi kas (c) Fungsi akuntansi (d) Fungsi pemeriksaan intern. (Mulyadi, 2001: 543).

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah (a) Bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut (b) Cek (c) Permintaan cek (*check request*). (Mulyadi, 2001:510).

Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah (a) Jurnal pengeluaran kas (*cash disbursement journal*) (b) Register cek. (Mulyadi, 2001:510).

Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dibentuk oleh beberapa jaringan prosedur. Jaringan

prosedur yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas adalah :

- a. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek, yang terdiri dari jaringan prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas. Jika pengeluaran kas timbul dari transaksi pembelian, sistem akuntansi pembelian telah mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung. Pada saat utang kepada pemasok jatuh tempo, bukti kas keluar dipakai sebagai perintah kepada bagian kasa untuk membuat cek. Atas dasar bukti kas keluar tersebut, Bagian kasa mengisi cek, mendapatkan otorisasi atas cek dari pejabat yang berwenang, dan kemudian mengirimkan cek itu kepada kreditur.
- b. Sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek, yang terdiri dari jaringan prosedur berikut :
 - 1) Prosedur Permintaan Cek.
 - 2) Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar (BKK).
 - 3) Prosedur Pembayaran Kas.
 - 4) Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas. (Mulyadi, 2001:501).

Sistem pengendalian intern yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar (Bank) ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut :

- a. Semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya.
- b. Semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek.
- c. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek (karena jumlahnya kecil) dilakukan melalui dana kecil yang diselenggarakan dengan *imprest system*. (Mulyadi, 2001:516).

Adapun unsur-unsur sistem pengendalian intern akuntansi pengeluaran kas meliputi:

- a. Organisasi
 - 1) Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Ini dimaksudkan agar data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dijamin keandalannya.
 - 2) Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh

Bagian kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi lain. Unsur sistem pengendalian intern mengharuskan pelaksanaan setiap transaksi oleh lebih dari fungsi agar terciptanya *internal check*. Dengan pelaksanaan transaksi ini kas perusahaan terjamin keamanannya dan data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dapat dijamin ketelitian dan keandalannya.

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan

- 1) Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang
- 2) Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang
- 3) Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas (atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek) harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.

c. Praktik yang Sehat

- a) Saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya.
- b) Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi “cap lunas” oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan.
- c) Pengguna rekening koran bank (*Bank Statement*), yang merupakan informasi dari pihak ketiga, untuk menegcek ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlihat dalam pencatatan dan penyimpanan kas.
- d) Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahbukuan.
- e) Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil. Pengeluaran ini dilakukan melalui dana kas kecil, yang akuntansinya diselenggarakan dengan *imprest system*.
- f) Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan.
- g) Kas yang ada ditangan (*cash in safe*) dan kas yang ada diperjalanan (*Cash in Transit*) diasuransikan dari kerugian.
- h) Kasir Diasuransikan (*Fidelity Bond Insurance*).

- i) Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan (misalnya mesin register kas, almari besi, dan *strong room*).
- j) Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. (Mulyadi, 2001:518-519).

4. Asuransi

Pengertian asuransi menurut undang-undang tentang usaha perasuransian (UU Republik Indonesia No.2/1992) adalah sebagai berikut: “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Yang dimaksud penanggung dalam definisi itu adalah suatu badan usaha asuransi yang memenuhi ketentuan UU No.2/1992. Pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain yang akan berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat). (Nugroho, 2011:8).

Selanjutnya pasal 21 UU No.2/1992 menjelaskan bisnis atau bidang usaha perasuransian sebagai berikut “usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang”. Menurut ketentuan pasal 246 KUHD : “pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan

yang diharapkan yang mungkin di deritanya akibat dari suatu *evenemen*”.

Subyek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak.

Menurut beberapa ahli tentang perasuransian dan asuransi memiliki makna yang berbeda, “istilah perasuransian berasal dari kata asuransi yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata asuransi diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum perasuransian, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi” (Abdulkadir, 2006:5). Asuransi adalah transaksi pertanggungan yang melibatkan dua pihak, tertanggung dan penanggung. Penanggung menjamin pihak tertanggung, bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian yang dideritanya, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau yang semula belum dapat ditentukan saat kapan terjadinya. Sebagai kontraperasinya tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada si penanggung, yang besarnya sekian persen dari nilai pertanggungan, yang disebut premi. (Djojosoedarso, 2003:71). Berikut adalah beberapa penggolongan asuransi sebagai berikut :

- 1) Asuransi kerugian, misalnya asuransi pencurian, asuransi pembongkaran, asuransi perampokan, asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian.
- 2) Asuransi jumlah, contoh asuransi jumlah : asuransi jiwa, asuransi sakit, asuransi kecelakaan. (Sastrawidjaja, 2003:82-88).

Berbagai kepentingan yang berlainan untuk setiap orang, asuransi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, sebagai berikut :

- a. asuransi berdasarkan jenis objeknya, (1) Asuransi orang, (2) Asuransi jiwa (3) Asuransi dana pensiun (4) Asuransi pendidikan (5) Asuransi kesehatan (6) Asuransi kecelakaan diri (7) Asuransi harta benda (8) Asuransi kebakaran (9) Asuransi pengangkutan (10) Asuransi kendaraan bermotor (11) Asuransi kapal laut (12) Asuransi pesawat terbang (13) Asuransi minyak dan gas bumi (14)

Asuransi rekayasa (15) Asuransi tanggung gugat

- b. Asuransi berdasarkan sifatnya, (1) Asuransi sosial, Perusahaan asuransi yang mengelola usaha asuransi sosial adalah PT Asuransi Kesehatan (PT Askes), PT Jasa Raharja, PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT Taspen), PT Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek), PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri). (2) Asuransi sukarela, asuransi sukarela pada umumnya dikelola oleh swasta misalnya PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT Prudential Life Assurance. Nugroho (2011:23-46).

Tujuan Asuransi

Dalam melakukan semua kegiatan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, termasuk asuransi. Ada beberapa tujuan asuransi, yaitu sebagai berikut (1) Teori pengalihan resiko (2) Pembayaran ganti rugi (3) Pembayaran santunan (4) Kesejahteraan anggota (Abdulkadir, 2002:12).

Unsur-unsur asuransi atau pertanggungan, sebagai berikut :

- 1) Pihak-pihak, subyek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi.
- 2) Status Pihak-pihak, penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero), atau koperasi.
- 3) Objek Asuransi, objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian.
- 4) Peristiwa Asuransi, peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.
- 5) Hubungan Asuransi, hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. (Abdulkadir, 2006:8).

Manfaat Asuransi

Menyisihkan penghasilan untuk mengikuti program asuransi merupakan salah satu cara untuk memperoleh jaminan terhadap musibah yang dapat menimpa seseorang. Berikut manfaat primer asuransi, yaitu (a) Pemindahan resiko (b) Penghimpunan dana (c) Pembayaran premi asuransi yang seimbang. Manfaat sekunder asuransi, yaitu (a) Pemberi rasa aman (b) Pengendalian kerugian (c) Terjaganya kelangsungan aktivitas masyarakat (d) Sumber dana investasi (e) Pendorong pertumbuhan ekonomi. (Nugroho, 2011:12)

“Asuransi kesehatan merupakan program asuransi yang memberikan perlindungan kesehatan terhadap pihak tertanggung”. (Nugroho, 2011:30). Ada beberapa fungsi asuransi kesehatan, sebagai berikut (1) Asuransi biaya rawat inap (2) Santunan meninggal dunia (3) Hasil investasi per tahun dari akumulasi simpanan premi (4) Tambahan hasil investasi. www.bumiputera.com

Fungsi asuransi kesehatan mengurangi atau menghilangkan beban masyarakat terhadap semakin mahalnya biaya kesehatan dari tahun ke tahun. Asuransi kesehatan di Indonesia saat ini memberikan layanan yang menarik dan kemudahan bagi pihak tertanggung. Antara lain perlindungan kesehatan dalam jangka waktu yang lebih lama hingga 75 tahun, tersedianya rumah sakit yang melayani asuransi kesehatan yang tersebar diseluruh Indonesia, dan berbagai fasilitas yang disediakan jika pihak tertanggung maupun anggota keluarganya harus menjalani rawat inap dirumah sakit. (Nugroho, 2011:30).

5. Polis

“Polis asuransi merupakan suatu bukti perjanjian yang menjadi dasar perikatan dalam asuransi antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis”. (Nugroho, 2011:20). Produk yang dijual oleh perusahaan asuransi adalah janji-janji yang dicantumkan dalam suatu kontrak yang dikenal dengan sebutan polis. Kontrak asuransi merumuskan kapan perusahaan asuransi akan membayar yang ditanggung dan jumlah yang akan dibayarkan. Ketentuan pasal 255 KUHD yang dikutip (Abdulkadir, 2006:59).

“Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung”. (Abdulkadir, 2006:59).

Isi polis, “polis asuransi memuat tentang luas jaminan pertanggungan, hal-hal atau resiko yang

tidak dapat diasuransikan, serta persyaratan umum dan persyaratan khusus”. Nugroho (2011:20). Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus sebagai berikut :

- a) Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi
- b) Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga
- c) Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan
- d) Jumlah yang diasuransikan
- e) Bahaya-bahaya atau *evenemen* yang ditanggung oleh penanggung
- f) Saat bahaya atau *evenemen* mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung
- g) Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dari segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak

6. Klaim

Berdasarkan peraturan direksi AJB Bumiputera 1912 NO.PE.12/DIR/TEK/2007 menjelaskan klaim adalah suatu tuntutan atas hak dari pemegang polis atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau nilai tunai, yang timbul karena syarat-syarat karena perjanjian asuransinya telah dipenuhi.

Pada asuransi kesehatan, jenis-jenis klaim dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu (a) Klaim atas habis kontrak (b) Klaim atas Penebusan (c) Klaim atas Kecelakaan (d) Klaim atas Perawatan Rawat Inap, Operasi dan Rawat Jalan.

Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi, adapun prosedur pengajuan klaim asuransi sebagai berikut (a) Masa aktif polis asuransi (b) Pemberitahuan kerugian (c) Laporan kerugian (d) Dokumen pendukung klaim asuransi (e) Penelitian polis asuransi (f) Penelitian klaim asuransi (g) Penunjukan *loss adjuster* (h) Penyampaian keabsahan klaim asuransi (i) Penyelsaian klaim asuransi. (Nugroho, 2011:69-72).

3.METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mempelajari secara khusus suatu objek penelitian, yaitu pada AJB Bumi Putera 1912

Malang Cabang Dieng. Terutama dalam menilai penerapan pengendalian intern terhadap sistem akuntansi pengikat polis, pengajuan dan pembayaran klaim asuransi kesehatan. Peneliti akan melakukan penelitian dengan fokus penelitian sebagai berikut (1) sistem akuntansi pengikatan polis asuransi kesehatan ajb bumiputera 1912 malang cabang dieng (2) Sistem akuntansi pengajuan pembayaran klaim asuransi kesehatan ajb bumiputera 1912 malang cabang dieng (3) Sistem akuntansi pengeluaran kas untuk pembayaran klaim asuransi kesehatan ajb bumiputera 1912 malang cabang dieng (4) Pengendalian Intern terhadap Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Klaim Asuransi Kesehatan AJB Bumiputera 1912 Malang Cabang Dieng.

Penelitian ini dilakukan pada AJB Bumi Putera 1912 Cabang Malang Dieng yang bertempat di Jalan Galunggung No.76 A-76 B Malang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penyusunan laporan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Analisis yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung, menggunakan tahap sebagai berikut :

1. Melakukan analisis sistem akuntansi pengikatan polis asuransi kesehatan
2. Melakukan analisis sistem akuntansi pengajuan pembayaran klaim asuransi kesehatan
3. Melakukan analisis sistem akuntansi pengeluaran kas untuk pembayaran klaim asuransi kesehatan
4. Melakukan analisis pengendalian intern terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas untuk pembayaran klaim asuransi kesehatan

4.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem akuntansi pengikatan polis memiliki pemisahan fungsi sudah cukup baik, memenuhi persyaratan fungsi operasional, fungsi keuangan dan fungsi akuntansi, tetapi memiliki kelemahan pada dokumen penitipan premi dan tidak bernomor urut cetak. Sistem akuntansi pengajuan pembayaran klaim memiliki dokumen yang sudah baik hanya saja tidak bernomor urut cetak sehingga kurang bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kelemahannya pada sistem akuntansi pengajuan pembayaran klaim pada

bagian administrasi meneliti kelengkapan dan keabsahan serta menginput data, sebaiknya yang meneliti kelengkapan dan keabsahan dilakukan oleh dua bagian atau oleh staff administrasi, tidak dilakukan oleh staff administrasi saja. Dibuatkan satu fungsi untuk melakukan pengecekan kebenaran kejadian dilapangan, karena bisa saja tertanggung yang sakit atau meninggal ada unsur disengaja.

Mulai tahun 2012 pembayaran klaim tersentralisasi oleh kantor pusat di jakarta, setelah pengajuan pembayaran klaim mendapat persetujuan secara manual oleh kantor wilayah, staff layanan klaim menghitung kembali konsep perhitungan klaim dan mengentry nilai klaim melalui *Login* layanan klaim. Kepala cabang *Login* untuk *approval* nilai klaim yang dibayarkan, dan segera diproses oleh kantor pusat. Kantor pusat akan memberitahukan via email ke bagian administrasi jika klaim sudah dibayarkan kepada pemegang polis melalui rekening bank. Staff administrasi melakukan pembukuan pembayaran klaim yang sudah dibayarkan kepada pemegang polis. Kasir *approval voucher* agar polis yang dibayarkan terupdate status polisnya. Sistem sentralisasi bisa meminimalisir terjadinya potongan-potongan yang tidak seharusnya diterapkan pada pembayaran klaim.

Pengendalian intern terhadap sistem akuntansi pengikatan polis, pengajuan dan pembayaran klaim asuransi kesehatan, struktur organisasi pada AJB Bumiputera 1912 Malang Cabang Dieng memiliki kemudahan dalam pengambilan keputusan karena kepala cabang langsung membawahi KUAK dan supervisor, sehingga dapat langsung memberikan perintah dan wewenangnya, selain itu pengawasan yang dilakukan oleh kepala cabang kepada bawahannya akan lebih mudah. Bagian staff administrasi memiliki *jobdisk* pengikatan, pengajuan dan pengecekan kelengkapan data, sebaiknya pada bagian ini staff administrasi dibagi menjadi dua, staff administrasi produksi dan staff administrasi klaim, agar memiliki peranan masing-masing untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Penerapan struktur organisasi sudah cukup memenuhi unsur-unsur pengendalian intern, terdapat pemisahan fungsi dan tanggungjawab sudah cukup jelas dan semua bagian ikut.

Otorisasi sudah cukup baik pada sistem pengikatan polis, pengajuan dan pembayaran klaim, tetapi memiliki kelemahan pada pengajuan klaim sebaiknya memiliki staff administrasi klaim

untuk menangani pengajuan klaim serta penelitian klaim.

Praktek yang sehat pada AJB Bumiputera 1912 Malang Cabang Dieng masih kurang memenuhi syarat pengendalian intern yang baik. Formulir tidak bernomor urut tercetak, mengarsipkan dokumen tersebut masih belum urut sesuai tanggal, sehingga sulit ditemukan ketika membutuhkan formulir. Sebaiknya dari pihak internal melakukan pemeriksaan rutin untuk menguji ketelitian dokumen-dokumen yang digunakan untuk semua kegiatan.

5.KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian intern terhadap sistem akuntansi pengikatan polis, pengajuan dan pembayaran klaim asuransi kesehatan sudah cukup baik, namun ada beberapa kelemahan sebagai berikut :

- (1) Dari keseluruhan dokumen tidak memiliki nomor urut cetak
- (2) Staff administrasi menangani pengikatan polis dan pengajuan klaim.
- (3) Pemberian informasi yang kurang jelas untuk prosedur pengajuan pembayaran klaim pada saat pengikatan polis.
- (4) Pengarsipan data yang tidak sesuai tanggal, sehingga sulit ditemukan ketika membutuhkan formulir.
- (5) Penggunaan atas fasilitas komputer masih kurang memadai. Sehingga memungkinkan terjadi sabotasi terhadap data-data perusahaan dan tindakan yang tidak bertanggungjawab terhadap pemakaian komputer perusahaan.

Pencitraan yang kurang baik pada saat ini akan berakibat buruk bagi perusahaan dikemudian hari, harus diperhatikan lebih baik lagi tentang prosedur pengajuan klaim yang selama ini dirasa merugikan oleh masyarakat, karena pencitraan yang kurang baik akan menurunkan jumlah polis dan berakibat kepada asset perusahaan. Memperhatikan masalah yang ada, berikut adalah beberapa saran yang dapat direkomendasikan penulis pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Malang Dieng, sebagai berikut :

- (1) Rancangan dokumen dan formulir hendaknya diperbaiki dengan pencantuman nomor urut tercetak
- (2) Meneliti kelengkapan dan keabsahan dilakukan oleh dua bagian atau oleh staff administrasi

- (3) Arsip-arsip yang diletakkan dalam lemari penyimpanan arsip sebaiknya disusun berdasarkan jenisnya, sehingga tidak tercampur antara arsip yang sama dengan yang lainnya.
- (4) Wewenang dan tanggungjawab berkaitan dengan pelaksanaan sistem pembayaran klaim dicantumkan dalam *job description* setiap fungsi yang terkait.
- (5) Sebaiknya data-data penting perusahaan tidak disimpan didalam komputer yang dapat diakses secara bebas oleh para pegawai. Walaupun keadaan mengharuskan beberapa data perusahaan disimpan dalam komputer yang mudah diakses pegawai, maka sebaiknya pemakaiannya dilindungi dengan menggunakan *password*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya.
- Baridwan, Zaki. 2002. *Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur Dan Metode*. Edisi ke lima. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Bodnar, George dan Hoopwood William. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : PT Indeks, Kelompok Gramedia.
- Djojosoedarso, Soeisno. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Krismiadi, 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. UPP AMP YKPN.
- Laudon & Laudon, 2008. *Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital*. Jakarta : Salemba Empat.
- Marom, Choirul. 2002. *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang*. Jakarta : Grasindo.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi ketiga. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nugroho, Ari. 2011. *Seluk Beluk Perusahaan Asuransi*. Sleman : PT Intan Sejati Klaten.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*. Bandung : Alumni.

Perundang – undangan

Undang – undang No 2 tahun 1992 tentang *Usaha Perasuransian*

Peraturan direksi AJB Bumiputera 1912
NO.PE.12/DIR/TEK/2007 tentang *Klaim*

<http://www.bumiputera.co.id> diakses pada tanggal 03
desember 2012